

**LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN 2022**

LRA  
LO  
NERACA  
LPE  
CALK



**DINAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
2022**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan hidayahNya Laporan Keuangan Berbasis Akrual Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan hal yang signifikan dalam upaya menggulirkan proses demokrasi. Dalam kondisi yang sangat cepat berubah (*turbulence*), hal yang harus tetap dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah menjaga kepercayaan melalui unjuk kerja sebagaimana yang telah diamanatkan oleh seluruh masyarakat melalui penyediaan *public good services*. Hal yang dirasakan sangat dinantikan adalah bagaimana hal tersebut dapat dilaksanakan secara transparan dalam kerangka penyelenggaraan akuntabilitas oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui seluruh jajaran birokrasinya.

Diharapkan Laporan Keuangan Tahun 2022 DinasKetahanan Pangan Lombok Tengah ini dapat memberikan informasi yang diharapkan oleh seluruh *stakeholders* tentang pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah. Masukan dari para pembaca laporan ini sangat diharapkan untuk meningkatkan kinerja lembaga ini dimasa yang akan datang, sehingga lembaga ini dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Lombok Tengah.

Praya, 15 Februari 2023

Kepala DinasKetahanan Pangan  
Kabupaten Lombok Tengah



LALU AHMAD SATRIADI, ST  
NIP. 19651118 199603 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN**

*Jalan Gajah Mada No. 126 Kec. Praya Kode Pos 83511*

---

---

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun 2022 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan secara layak dan bebas salah saji yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Praya, 15 Februari 2023

Kepala Dinas,



LALU AHMAD SATRIADI, ST  
NIP. 19651118 199603 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

---

**A. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

**1. Asumsi Dasar Penyusunan Laporan Keuangan**

Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan laporan keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

- a) Asumsi Kemandirian entitas, berarti bahwa unit Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan dan SKPD sebagai entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan.
- b) Asumsi kesinambungan entitas, berarti bahwa laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas tersebut akan berlanjut keberadaannya dan tidak dimaksud untuk melakukan likuidasi.
- c) Asumsi keterukuran, berarti bahwa laporan keuangan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan uang.

**2. Basis Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Lombok Tengah adalah basis kas menuju akrual (*cash towards accrual*), dimana basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam Neraca.

- a) Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa :
  - 1) Pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

- 2) Belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- b) Aset, kewajiban dan ekuitas dana yang disajikan dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari Kas Umum Daerah.

### **3. Basis Pengukuran**

Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan SKPD ini menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas atau setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

### **4. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan**

Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan SKPD ini mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan demikian, dalam penyusunan LKPD ini telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait penyusunan Laporan Keuangan ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

##### **1) Akuntansi Pendapatan**

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan diakui

pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenisnya. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi. Akuntansi pendapatan dilakukan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto bukan jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan pada periode berjalan maupun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama dan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat pendapatan adalah Surat Tanda Setoran (STS), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan dokumen lain yang terkait.

## **2) Akuntansi Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan (Bendahara Umum Daerah). Belanja diklasifikasi menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.

### **a) Belanja Operasi**

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja

Operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial.

**b) Belanja Modal**

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, aset tetap lainnya dan aset lainnya.

**c) Belanja Lain-lain/Tak Terduga**

Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

**3) Neraca**

Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan. Neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana (net aset).

**1) Aset**

Aset adalah sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasannya berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

**a) Aset Lancar**

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar ini terdiri dari Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Persediaan.

- (1) **Kas di Bendahara Pengeluaran** adalah Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) merupakan kas yang menjadi tanggungjawab atau yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal Neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas, termasuk pajak-pajak yang telah dipungut yang belum disetor ke Kas Negara per tanggal Neraca.
- (2) **Kas di Bendahara Penerimaan** adalah mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di Bank maupun saldo uang tunai, yang berada dibawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan dari setoran para wajib pajak/retribusi yang belum disetorkan ke kas daerah.
- (3) **Piutang Pajak**, yakni piutang yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya/ketetapan pajak (SKPD) atau surat lain yang dipersamakan. Piutang pajak dicatat sebesar nilai nominal pajak yang belum dilunasi.
- (4) **Piutang Retribusi**, yakni piutang yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya/ketetapan

retribusi (SKR-D) atau surat lain yang dipersamakan. Piutang retribusi dicatat sebesar nilai nominal retribusi yang belum dilunasi.

- (5) **Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran** merupakan reklasifikasi tagihan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek yang disebabkan adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya.
- (6) **Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)** merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TP/TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya.
- (7) **Persediaan** adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Persediaan dicatat di neraca berdasarkan harga perolehan untuk persediaan yang diperoleh dengan cara membeli, harga standar apabila diperoleh dengan produksi sendiri, dan berdasarkan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lain seperti donasi/rampasan. Persediaan tersebut dinilai dengan menggunakan harga pembelian persediaan yang terakhir. Dokumen sumber untuk mencatat persediaan adalah laporan stock opname yang dibuat berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan yang tersisa pada akhir tahun anggaran.

#### **b) Investasi Jangka Panjang**

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun. Investasi Jangka Panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan non permanen

##### **(1) Investasi Permanen**

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan dan untuk

mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen Pemerintah Daerah dapat berupa Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara dan/atau investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan dan dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. Penilaian investasi dilakukan dengan metode biaya apabila kepemilikan Pemerintah Daerah kurang dari 20%, antara 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi mempunyai pengaruh yang signifikan menggunakan dan kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

## **(2) Investasi Non Permanen**

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi Non Permanen yang dilakukan pemerintah dapat berupa dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat dan investasi permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

Investasi Non permanen meliputi seluruh dana pemerintah daerah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota Koperasi, Kelompok Swadaya Masyarakat, Badan Perkreditan Rakyat. Penilaian investasi non permanen ini menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.



### **c) Aset Tetap**

Aset Tetap adalah Aset Berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan. Aset tetap diakui pada saat aset tetap tersebut telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Aset tetap terdiri dari: Tanah, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jembatan, Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan masing-masing aset tetap dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **(1) Tanah**

Tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Nilai tanah juga meliputi biaya pembelian bangunan tua yang terletak pada sebidang tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sebuah gedung yang baru jika bangunan tua itu dimaksudkan untuk dibongkar.

#### **(2) Gedung dan Bangunan**

Gedung dan Bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak. Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung

lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada.

**(3) Jalan, Irigasi dan Jembatan**

Jalan, irigasi dan jaringan, menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan jaringan tersebut siap pakai.

**(4) Peralatan dan Mesin**

Peralatan dan Mesin, menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian dan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan. Untuk peralatan dan mesin yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

**(5) Aset Tetap Lainnya**

Aset tetap lainnya, menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap lainnya sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan semua aset tetap lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dengan tepat kedalam aset tetap yang telah diuraikan sebelumnya.

**(6) Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi dalam pengerjaan menggambarkan biaya yang diakumulasikan sampai pada tanggal laporan posisi keuangan dari semua jenis aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Nilai konstruksi yang dikerjakan kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan, kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan

yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan dan pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Konstruksi dalam pengerjaan direklasifikasi ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

Aset tetap dihapuskan dari neraca ketika dilepaskan dan bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi dimasa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dihapuskan dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **d) Aset Lainnya**

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang dan aset tetap. Termasuk Aset Lainnya adalah antara lain Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

##### **(1) Tagihan Penjualan Angsuran**

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari berita acara penjualan aset yang bersangkutan, yang dikeluarkan oleh Bagian Aset.

##### **(2) Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi**

Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi menggambarkan tagihan kepada bendahara/pegawai Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang terbukti menyalahgunakan uang Negara/daerah atau menghilangkan aset pemerintah/pemerintah daerah. Tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan dari

pejabat yang berwenang setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

### **(3) Aset Tak Berwujud**

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah. Aset tak berwujud meliputi software komputer, lisensi dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya serta hasil kajian/penelitian.

### **(4) Aset Lain-lain**

Aset Lain-lain adalah aset-aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap pemerintah daerah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah (aset tetap yang kondisinya rusak berat) dan aset-aset yang diserahkan kepada pihak ketiga, namun belum ada naskah hibahnya.

### **3) Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar kembalidalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiaannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban muncul antara lain karena sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban diakui pada saat dana

pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul dan dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban pemerintah daerah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

**a) Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek meliputi, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

**(1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga**

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran Askes, Taspen, dan Tapperum.

**(2) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang**

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan reklasifikasi kewajiban jangka panjang ke dalam bagian lancar utang jangka pendek yang disebabkan adanya kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya.

**(3) Utang Pemotongan Pajak Pusat (PPN/PPh)**

Utang Pemotongan Pajak Pusat merupakan kewajiban yang timbul akibat Bendahara Pengeluaran belum menyetorkan PPN/PPh yang dipungut dari transaksi belanja barang dan jasa.

**(4) Utang Jangka Pendek Lainnya**

Utang kepada Pihak ketiga merupakan kewajiban yang timbul karena pemerintah telah menerima barang atau

jasa yang ada pada kontrak perjanjian namun belum dilakukan pembayaran atas barang atau jasa tersebut

**b) Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban jangka panjang yaitu kewajiban yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang pemerintah terdiri dari utang luar negeri dan utang dalam negeri.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Utang bunga atas utang pemerintah daerah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari pemerintah daerah baik daridalam maupun luar negeri. Utang bunga yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

**4) Ekuitas Dana**

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah daerah. Ekuitas dan diklasifikasikan atas Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan.

**a. Ekuitas dan lancar**

Ekuitas dan lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek yang mencerminkan kekayaan pemerintah yang bersifat lancar.

**b. Ekuitas Dana Investasi**

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.

### **c. Ekuitas Dana Cadang**

Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai peraturan perundangan.

#### **4) Akuntansi Surplus/Defisit**

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit.

#### **5) Transaksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Berbentuk Barang dan Jasa**

Transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi. Disamping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diterima/dikeluarkan. Contoh transaksi berwujud barang dan jasa adalah hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah secara garis besar telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Namun demikian masih terdapat hal yang masih belum sesuai dengan ketentuan dalam SAP yakni seluruh aset tetap yang dikelola oleh SKPD/Pemerintah Daerah selaku pengguna barang belum disusutkan/didepresiasi, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap paragraf 53, dimana *Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan (depresiasi).*



## B. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

### I. POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

#### 1. Pendapatan

Target pendapatan asli daerah Tahun 2022 sebesar Rp. 0,00. Hal ini karena Dinas Ketahanan Pangan tidak memiliki sumber retribusi. Tahun 2022 terdapat realisasi pendapatan dari denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp. 2.835.280,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan Pajak	-	-	-
2	Pendapatan Retribusi	-	-	-
3	Lain-lain PAD yang Sah	-	2.835.280,00	100
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>2.835.280,00</b>	<b>100</b>

Perincian Pendapatan Asli Daerah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

#### a) Pajak Daerah

Dinas Ketahanan Pangan Kab. Lombok Tengah tidak memiliki sumber Pendapatan dari Pajak Daerah. Sehingga TA 2022 realisasi Pajak Daerah sebesar Rp. 0,00.

#### b) Retribusi Daerah

Dinas Ketahanan Pangan Kab. Lombok Tengah tidak memiliki sumber Pendapatan dari Retribusi Daerah. Sehingga TA 2022 realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp. 0,00.

#### c) Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.835.280,00. Realisasi lain-lain PAD yang sah pada Dinas Ketahanan Pangan selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Uraian*	Anggaran	Realisasi	%
1.	Hasil Penjualan Aset yang Tidak Dipisahkan	-	-	-
2.	Pendapatan Jasa Giro	-	-	-
3.	Tuntutan Ganti Kerugian	-	-	-

	Daerah			
4.	Pendapatan atas Denda Keterlambatan Pekerjaan	-	2.835.280,00	100
5.	Pendapatan dari Pengembalian Belanja	-	-	-
6.	Pendapatan dari angsuran cicilan rumah/kendaraan	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>	<b>2.835.280,00</b>	<b>100</b>

## 2. Belanja

Dari Anggaran Belanja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah yang tertuang DPA TA 2022 sebesar Rp.7.159.352.593,00 dengan realisasi sampai 31 Desember 2022 mencapai Rp. 6.900.276.510,00 atau 96,38 % dengan sisa anggaran sebesar Rp. 259.076.083,00.

Adapun perincian dari realisasi belanja daerah adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Operasi	7.152.852.593,00	6.893.776.510,00	96,38
2.	Belanja Modal	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>7.159.352.593,00</b>	<b>6.900.276.510,00</b>	<b>96,38</b>

### a) Belanja Operasi

Realisasi belanja operasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 6.893.776.510,00 atau 96,38% dari anggaran sebesar Rp.

7.152.852.593,00 Realisasi belanja operasi digunakan untuk membiayai kegiatan operasional SKPD dengan perincian sebagai berikut :

No.	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	2.342.062.100,00	2.186.854.416,00	93,37
2.	Belanja Barang dan Jasa : 1) Hibah barang/jasa yang	3.868.438.926,00	3.807.844.550,00	98,43

	diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat			
	2) Barang jasa selain hibah	942.351.567,00	899.077.544,00	95,41
<b>Jumlah</b>		<b>7.152.852.593,00</b>	<b>6.893.776.510,00</b>	<b>96,38</b>

Realisasi belanja operasi diatas dapat dirinci sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp. 2.186.854.416,00 dari target anggaran sebesar Rp. 2.342.062.100,00 atau 93,37 % dari target belanja operasi secara keseluruhan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Belanja*	Anggaran	Realisasi	%
1	Gaji dan Tunjangan PNS	1.502.313.155,00	1.419.493.888,00	94,49
2	Tambahan Penghasilan PNS	836.514.945,00	764.126.528,00	91,35
3	Biaya Pemungutan PAD	-	-	-
4	Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD	-	-	-
5	Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-
6	Insentif atas Pemungutan PAD	-	-	-
7	Honorarium PNS	3.234.000,00	3.234.000,00	100,00
8	Honorarium Non PNS	-	-	-
9	Uang Lembur	-	-	-
10	Belanja Beasiswa Pendidikan. PNS	-	-	-
11	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan BinteK PNS	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>2.342.062.100,00</b>	<b>2.186.854.416,00</b>	<b>93,37</b>

## 2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp.4.810.790.493,00 dan sampai 31 Desember 2022 direalisasikan sebesar Rp. 4.706.922.094,00 atau 97,84 % yang terdiri dari:

a) Belanja Barang/jasa yang akan diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga, terdiri dari:

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1	Pengadaan Alat Pengolahan Pangan Alternatif	33.906.270,00	27.000.000,00	79,63
2	Pengadaan Beras	106.200.000,00	90.712.500,00	85,42
3	Pengadaan Benih Sayuran	20.744.136,00	20.706.000,00	99,82
4	Pembuatan Plang Kelompok	5.100.000,00	5.100.000,00	100,00
5	Pengadaan Bibit Buah-Buahan	49.616.604,00	49.308.000,00	99,38
6	Pengadaan Polybag dan Jaring Tanaman	20.268.900,00	20.100.000,00	99,17
7	Pengadaan Obat-Obatan	37.103.016,00	37.078.800,00	99,93
8	DAK Fisik Pembangunan Gudang Lumbung Pangan	720.000.000,00	720.000.000,00	100,00
9	DAK Fisik Pembangunan Rumah Rice Milling Unit dan Bed Dryer	561.000.000,00	561.000.000,00	100,00
10	DAK Fisik Pembangunan Lantai Jemur	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00
11	Pengadaan Pengisian Lumbung Pangan Masyarakat	299.700.000,00	294.705.000,00	98,33
12	Biaya Perencanaan Pembangunan Lumbung Pangan dan Lantai Jemur	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00
13	Pembangunan Gudang Lumbung Pangan	222.800.000,00	222.134.000	99,70
14	Pembangunan Lantai Jemur	120.000.000,00	119.360.000,00	99,47
15	Biaya Pengawasan Pembangunan Lumbung Pangan dan Lantai Jemur	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00
16	Pengadaan Mesin RMU dan Mesin Bed Dryer	1.449.000.000,00	1.417.640.250,00	97,84
17	DAK Non Fisik Pekarangan Pangan	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00

	Lestari (P2L)			
<b>Jumlah</b>		<b>3.868.438.926,00</b>	<b>3.807.844.550,00</b>	<b>98,43</b>

b) Belanja barang/jasa selain barang yang akan diserahkan kepada masyarakat dapat dirinci sebagai berikut:

No.	Jenis Belanja*	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	99.457.650,00	97.606.350,00	98,14
2	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	71.311.785,00	68.598.900,00	96,20
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	6.830.000,00	6.830.000,00	100,00
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	5.613.300,00	5.610.000,00	99,94
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	1.949.280,00	1.938.000,00	99,42
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	1.001.442,00	960.000,00	95,86
8	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	675.000,00	675.000,00	100,00
9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
10	Belanja Natura dan Pakan-Natura	868.000,00	868.000,00	100,00
11	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	132.990.000,00	126.895.000,00	95,42
12	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.850.000,00	3.850.000,00	100,00

13	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	48.000.000,00	45.322.200,00	94,42
14	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	73.500.000,00	73.500.000,00	100,00
15	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	17.500.000,00	17.500.000,00	100,00
16	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
17	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	154.600.000,00	154.600.000,00	100,00
18	Belanja Tagihan Air	5.908.750,00	3.831.080,00	64,84
19	Belanja Tagihan Listrik	17.872.360,00	17.822.603,00	99,72
20	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.480.000,00	3.480.000,00	100,00
21	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	8.976.000,00	7.380.480,00	82,22
22	Belanja Paket/Pengiriman	10.000.000,00	0,00	0,00
23	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	7.590.000,00	6.094.698,00	80,30
24	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerjaga Non ASN	572.184,00	572.184,00	100,00
25	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	723.816,00	723.816,00	100,00
26	Belanja Sosialisasi	30.750.000,00	30.750.000,00	100,00
27	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00
28	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
29	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.830.000,00	1.830.000,00	100,00

30	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Personal Computer	3.650.000,00	3.650.000,00	100,00
31	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	90.262.000,00	78.969.233,00	87,49
32	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	104.090.000,00	100.720.000,00	96,76
<b>Jumlah</b>		<b>942.351.567,00</b>	<b>899.077.544,00</b>	<b>95,41</b>

**b) Belanja Modal**

Realisasi belanja modal digunakan untuk membiayai pengadaan aset. Realisasi belanja modal per 31 Desember 2022 sebesar Rp.6.500.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp. 6.500.000,00.

No.	Jenis Belanja*	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Tanah	-	-	-
2	Belanja Peralatan dan Mesin	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-
<b>J u m l a h</b>		<b>6.500.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>100,00</b>

Realisasi belanja modal tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

1. Belanja Tanah

No.	Jenis Belanja*	Anggaran	Realisasi	%
1	Pengadaan Tanah Pertanian	-	-	-
2	Pengadaan Tanah Prasarana Jalan Umum	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

2. Belanja Peralatan dan Mesin

No.	Jenis Belanja*	Anggaran	Realisasi	%
1	Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	-	-	-
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat	-	-	-

	UkurLainnya			
3	Pengadaan Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian	-	-	-
4	Pengadaan Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>6.500.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>100,00</b>

3. Gedung dan Bangunan

No.	Jenis Belanja*	Anggaran	Realisasi	%
1.	Gedung	-	-	-
2.	Bangunan	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	Jenis Belanja*	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan	-	-	-
2	Belanja Modal PengadaanKontruksiJembatan	-	-	-
3	Belanja Modal PengadaanKontruksiJaringan Air	-	-	-
4	Belanja Modal PengadaanInstalasiListrik dan Telepon	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

5. Belanja Aset Tetap Lainnya

No.	Jenis Belanja*	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	-	-	-
2	Belanja modal pengadaan	-	-	-

	alat kontruksi/pertukangan			
3	Belanja Modal PengadaanPerlengkapan Kantor	-	-	-
<b>Jumlah</b>		-	-	-

### 3. Surplus/Defisit

Dari anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, maka defisitrealisasi anggaran adalah sebesar Rp. (6.897.441.230,00).

## II.POS-POS NERACA

### 1. ASET

#### a) Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2022terdiri dari:

##### 1) Kas di Bendahara Pengeluaran\*

Saldo KasTunai di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 0,00dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo
1.	Sisa UP	0,00
2.	Sisa TUP	0,00
3.	Pajak Pusat yang belum disetor ke Kas Negara	-
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>

##### 2) Kas diBendaharaPenerimaan

Kas di BendaharaPenerimaanmerupakanpendapatanaslidaerah yangditerima oleh bendaharapenerimaan yang sampaidengantanggalpelaporanbelumdisetorkanke kas Daerah.

No.	Uraian	Saldo
1.	Retribusi makan /minum/restoran	-
2.	Retribusihotel	-
<b>Jumlah</b>		-

### 3) Piutang Pajak

Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00 merupakan jumlah tagihan Pajak yang sampai dengan tanggal pelaporan belum disetorkan oleh wajib pajak, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Saldo Tahun 2022	Saldo Tahun 2021
1.	Piutang Pajak Hotel	-	-
2.	Piutang Pajak Restoran	-	-
<b>Jumlah</b>		-	-

Saldo piutang pajak ini merupakan saldo piutang yang berdasarkan administrasi di Dinas Pendapatan telah mempunyai ketetapan pajak atau yang setar dengan surat ketetapan pajak.

### 4) Piutang Retribusi

Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo Tahun 2022	Saldo Tahun 2021
1.	Retribusi restoran	-	-
2.	Retribusi hotel	-	-
<b>Jumlah</b>		-	-

### 5) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp.0,00. Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran TA 2022 merupakan akumulasi atas Penjualan Rumah Dinas dan Kendaraan Dinas yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dan diharapkan akan dibayarkan pada tahun anggaran 2022, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo Tahun 2022	Saldo Tahun 2021
1.	BLTPA- Rumah Dinas	-	-
2.	BLTPA- Kendaraan Roda 2	-	-
3.	BLTPA- Kendaraan Roda 4	-	-
<b>Jumlah</b>		-	-

6) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00 merupakan saldo tuntutan ganti rugi atas hasil pemeriksaan beberapa instansi pemeriksa dan/atau pengawas dan tuntutan ganti rugi perorangan atas kelebihan pembayaran tunjangan anak dan kelebihan pembayaran perjalanandinas yang terdiri dari:

No.	Uraian	Saldo Tahun 2022	Saldo Tahun 2021
1.	BPK RI	-	-
2.	BPKP	-	-
3.	Inspektorat Kab. Lombok Tengah	-	-
4.	Inspektorat Provinsi NTB	-	-
5.	TGR Perorangan	-	-
<b>Jumlah</b>		-	-

7) Persediaan

Persediaan merupakan barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Saldo persediaan per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp. 816.816.993,00 dan Rp. 725.718.993,00. Nilai persediaan ini ditentukan berdasarkan *stock opname* yang dilaksanakan oleh pengurus barang SKPD, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Persediaan*	Saldo 2022	Saldo 2021
1.	Persediaan ATK, dll	590.000,00	204.500,00
2.	Persediaan Barang Kuasi	-	-
3.	Persediaan Alat Listrik	-	-
4.	Persediaan Obat-obatan	-	-

5.	Persediaan Alat Kesehatan	-	-
6.	Persediaan Obat Tanaman	-	-
7.	Persediaan Bahan Baku Bangunan	-	-
8.	Persediaan Bahan Makanan	-	-
9.	Persediaan Alat Kebersihan	-	-
10.	Barang/jasayang akan dihibahkan	816.226.993,00	725.514.493,00
<b>Jumlah</b>		<b>816.816.993,00</b>	<b>725.718.993,00</b>

**b) Investasi Jangka Panjang**

Investasi Non Permanen

Saldo Investasi Non Permanen per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00. Merupakan jumlah investasi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk penguatan modal yang diberikan sebagai pinjaman bergulir maupun non bergulir kepada masyarakat.

**c) Aset Tetap**

Saldo Aset tetap per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp3.081.704.560,00 dan Rp. 3.238.870.680,00. Nilai Aset Tetap merupakan jumlah aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari:

No	Uraian	Saldo Tahun 2022	Saldo Tahun 2021
1.	Tanah	250.000.000,00	250.000.000,00
2.	Peralatan dan Mesin	2.036.694.749,00	2.030.194.749,00
3.	Gedung dan Bangunan	3.217.297.000,00	3.217.297.000,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jembatan	-	-
5.	Aset Tetap Lainnya	-	-
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
7.	Akumulasi Penyusutan	(2.422.287.189,00)	(2.258.621.069,00)
<b>Jumlah</b>		<b>3.081.704.560,00</b>	<b>3.238.870.680,00</b>

Jumlah aset tetap pada Tahun 2022 tidak mengalami penambahan atau pengurangan dari keadaan tahun sebelumnya.

Aset tetap tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Tanah

Nilai aset tanah per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp. 250.000.000,00 dan Rp. 250.000.000,00 yang menunjukkan tidak ada mutasi tambah atau kurang.

No.	Jenis Aset	Saldo Tahun 2021	Mutasi		Saldo Tahun 2022
			Tambah	Kurang	
1.	Tanah	250.000.000,00	-	-	250.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>250.000.000,00</b>	-	-	<b>250.000.000,00</b>

2) Peralatan dan Mesin

Nilai aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp. 2.036.694.749,00 dan Rp. 2.030.194.749,00 yang menunjukkan tidak ada mutasi tambah atau kurang.

No.	Jenis Aset	Saldo Tahun 2021	Mutasi		Saldo Tahun 2022
			Tambah	Kurang	
1.	Alat-alat Angkutan	1.275.425.400,00	-	-	1.275.425.400,00
2.	Alat Bengkel dan Alat Ukur	29.340.000,00	-	-	29.340.000,00
3.	Alat Pertanian	1.600.000,00	-	-	1.600.000,00
4.	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	1.070.998.250,00	6.500.000,00	-	1.077.498.250,00
5.	Alat Studio Dan Alat Komunikasi	110.373.000,00	-	-	110.373.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.030.194.749,00</b>	-	-	<b>2.036.694.749,00</b>

3) Gedung dan Bangunan

Nilai aset gedung dan bangunan per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp. 3.217.297.000,00 dan Rp. 3.217.297.000,00 yang menunjukkan tidak ada mutasi tambah atau kurang.

No.	Jenis Aset	Saldo Tahun 2021	Mutasi		Saldo Tahun 2022
			Tambah	Kurang	
1.	Gedung	3.217.297.000,00	-	-	3.217.297.000,00
2.	Monumen / Situs	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>3.217.297.000,00</b>	-	-	<b>3.217.297.000,00</b>

4) Jalan, Irigasi dan Jembatan

Nilai aset jalan, irigasi dan jembatan per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00 yang menunjukkan tidak ada mutasi tambah atau kurang.

No.	Jenis Aset	Saldo Tahun 2021	Mutasi		Saldo Tahun 2022
			Tambah	Kurang	
1.	Jalan	-	-	-	-
2.	Jembatan	-	-	-	-
3.	Jaringan Irigasi	-	-	-	-
4.	Jaringan Instalasi	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

5) Aset Tetap Lainnya.

Nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00 yang menunjukkan tidak ada mutasi tambah atau kurang.

No.	Jenis Aset	Saldo Tahun 2021	Mutasi		Saldo Tahun 2022
			Tambah	Kurang	
1.	Belanja Modal Hewan, Ternak Serta Tanaman	-	-	-	-
2.	Pengadaan peralatan	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	-	-	-	-

#### 6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00 yang menunjukkan tidak ada mutasi tambah atau kurang.

No.	Jenis Aset	Saldo Tahun 2021	Mutasi		Saldo Tahun 2022
			Tambah	Kurang	
1.	Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
2.	Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	-	-	-	-

#### d) Aset Lainnya

Aset lain-lain/lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang secara fisik telah dikuasai oleh masyarakat, namun sampai dengan tanggal pelaporan aset tersebut belum dibuatkan naskah pernyataan hibah (NPH) dan aset tetap yang dalam kondisi rusak berat yang tidak dapat digunakan lagi dalam operasional aktif pemerintah.

No.	Jenis Aset	Penerima	Saldo Tahun 2022	Saldo Tahun 2021
1.	Aset Lainnya	-	-	-
2.	Penyusutan		-	-
	<b>Jumlah</b>		-	-

## 2. KEWAJIBAN

### 1) Uang Muka dari BUD

Saldo uang muka dari BUD sebesar Rp. 0,00, merupakan kewajiban Bendahara Pengeluaran untuk menyetorkan sisa UYHD ke Kas Daerah. Timbulnya utang ini karena sampai dengan berakhirnya tahun anggaran Bendahara Pengeluaran tidak menyetorkan sisa UYHD ke Kas Daerah.

### 2) Utang Pajak Pusat

Saldo Utang Pajak per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00 merupakan kewajiban Bendahara Pengeluaran untuk menyetorkan kepada Kas Negara atas pemungutan pajak. Utang Pajak Pusat ini terdiri dari:

No.	Uraian	Saldo Tahun 2022	Saldo Tahun 2021
1.	Utang PPh 21	-	-
2.	Utang PPh 22	-	-
3.	Utang PPh 23	-	-
4.	Utang PPN	-	-
<b>TOTAL</b>		-	-

### 3) Pendapatan yang Ditangguhkan

Saldo Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan pendapatan daerah yang telah dipungut oleh Bendahara Penerimaan, namun sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, pendapatan tersebut belum disetor ke Kas Daerah.

### 4) Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo utang jangka pendek lainnya merupakan utang kepada pihak ketiga berasal dari kontrak atau perolehan barang/jasa yang belum dibayar sampai dengan berakhirnya tahun anggaran. Utang jangka pendek kepada pihak ketiga ini terdiri dari:

No.	Uraian	Saldo Tahun2022	Saldo Tahun2021
1.	Utang Beban ( Listrik, Air, dan TeleponbulanDesember 2022 )	3.873.570,00	1.472.292,00
2.	Utang BelanjaPegawai	65.584.012,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>69.457.582,00</b>	<b>2.869.912,00</b>

### 3. EKUITAS/DANA

Saldo Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp 3.829.063.971,00 dan Rp. 3.961.719.761,00. Saldo Ekuitas Dana Lancar tersebut di atas juga merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang bersifat lancar, merupakan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai kewajiban lancar/kewajiban jangka pendek.

Praya, 15 Februari 2023  
Kepala Dinas Ketahanan Pangan,



LALU AHMAD SATRIADI, S.T  
NIP. 19651118 199603 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN 2022**

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2022	Bertambah/ (Berkurang)	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>					
2						
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>					
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-	-
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-	-
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	2,835,280.00	2,835,280.00	-	-
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	-	<b>2,835,280.00</b>	<b>2,835,280.00</b>	-	-
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>7,159,352,593.00</b>	<b>6,900,276,510.00</b>	<b>259,076,083.00</b>	<b>96.38</b>	<b>3,297,271,379.00</b>
2.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>7,152,852,593.00</b>	<b>6,893,776,510.00</b>	<b>259,076,083.00</b>	<b>96.38</b>	<b>3,247,921,379.00</b>
2.1.1	Belanja Pegawai Tidak Langsung	2,338,828,100.00	2,183,620,416.00	155,207,684.00	93.36	2,101,699,249.00
2.1.2	Belanja Pegawai Langsung	3,234,000.00	3,234,000.00	-	100.00	3,234,000.00
2.1.3	Belanja Barang dan Jasa :					
2.1.3.1	- Hibah barang/jasa ke pihak ketiga/ Masyarakat	3,868,438,926.00	3,807,844,550.00	60,594,376.00	98.43	1,484,487,300.00
2.1.3.2	- Barang/jasa selain hibah ke pihak ketiga	942,351,567.00	899,077,544.00	43,274,023.00	95.41	757,728,185
2.2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>6,500,000.00</b>	<b>6,500,000.00</b>	-	<b>100.00</b>	<b>10,000,000.00</b>
2.2.1	Belanja Tanah	-	-	-	-	-
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	6,500,000.00	6,500,000.00	-	100.00	10,000,000.00
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>7,159,352,593.00</b>	<b>6,900,276,510.00</b>	<b>259,076,083.00</b>	<b>96.38</b>	<b>3,297,271,379.00</b>
	<b>Surplus/ (Defisit)</b>	<b>(7,159,352,593.00)</b>	<b>(6,897,441,230.00)</b>	<b>(256,240,803.00)</b>	<b>96.34</b>	<b>(3,297,271,379.00)</b>

Praya, 15 Februari 2023  
Kepala Dinas Ketahanan Pangan,

  
**L. N. U. AHMAD SATRIADI, ST**  
NIP. 19651118 199603 1 002

<b>Nomor Urut</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Anggaran Setelah Perubahan</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>Bertambah/ (Berkurang)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2021</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
DINAS KETAHANAN PANGAN  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN 2022

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2022	Bertambah/ (Berkurang)	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>PENDAPATAN</b>					
2						
3	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>					
4	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-	-
5	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-	-
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
7	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	2,835,280.00	2,835,280.00	100.00	-
8						
9	<b>Jumlah Pendapatan</b>	-	<b>2,835,280.00</b>	<b>2,835,280.00</b>	<b>100.00</b>	-
10						
11	<b>BELANJA</b>	<b>7,159,352,593.00</b>	<b>6,900,276,510.00</b>	<b>259,076,083.00</b>	<b>96.38</b>	<b>4,357,148,734.00</b>
12						
13	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>7,152,852,593.00</b>	<b>6,893,776,510.00</b>	<b>259,076,083.00</b>	<b>96.38</b>	<b>4,347,148,734.00</b>
14	Belanja Pegawai	2,342,062,100.00	2,186,854,416.00	155,207,684.00	93.37	2,104,933,249.00
15	Belanja Barang dan Jasa	942,351,567.00	899,077,544.00	43,274,023.00	95.41	757,728,185.00
16	Belanja Hibah	3,868,438,926.00	3,807,844,550.00	60,594,376.00	98.43	1,484,487,300.00
17						
18	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>6,500,000.00</b>	<b>6,500,000.00</b>	-	<b>100.00</b>	<b>10,000,000.00</b>
19	Belanja Tanah	-	-	-	-	-
20	Belanja Peralatan dan Mesin	6,500,000.00	6,500,000.00	-	100.00	10,000,000.00
21	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-
22	Belanja Jalan, Irigasi dan	-	-	-	-	-
23	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-
24	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-	-
25						
26	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>7,159,352,593.00</b>	<b>6,900,276,510.00</b>	<b>259,076,083.00</b>	<b>96.38</b>	<b>4,357,148,734.00</b>
27						
28	<b>Surplus/ (Defisit)</b>	<b>(7,159,352,593.00)</b>	<b>(6,897,441,230.00)</b>	<b>(256,240,803.00)</b>	<b>96.34</b>	<b>(4,357,148,734.00)</b>

Praya, 15 Februari 2023  
Kepala Dinas Ketahanan Pangan,



**LALU AHMAD SATRIADI, ST**  
NIP. 19651118 199603 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
DINAS KETAHANAN PANGAN  
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	<b>PENDAPATAN</b>				
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>				
3	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
4	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	-	-	-	-
6	Lain-lain PAD Yang Sah	2,835,280.00	-	2,835,280.00	100.00
7	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>2,835,280.00</b>	<b>-</b>	<b>2,835,280.00</b>	<b>100.00</b>
8					
9	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
10	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
13	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
14	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
15	<b>Jumlah Pendapatan Transfer - Dana</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
16					
17	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA</b>				
18	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
19	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
20	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
21					
22	<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
25	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
26	<b>Jumlah Pendapatan Transfer</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
27					
28	<b>LAIN - LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>				
29	Pendapatan Hibah - LO	-	-	-	-
30	Dana Darurat - LO	-	-	-	-
31	Pendapatan Lainnya - LO	-	-	-	-
32	<b>Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
33	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>2,835,280.00</b>	<b>-</b>	<b>2,835,280.00</b>	<b>100.00</b>
34					
35	<b>BEBAN OPERASI</b>				
36	Beban Pegawai	2,249,204,428.00	2,101,699,249.00	147,505,179.00	0.07
37	Beban Ekstracompatible	-	-	-	-
38	Beban Persediaan	196,700,750.00	190,107,000.00	6,593,750.00	0.03
39	Beban Jasa	518,559,719.00	481,215,876.00	37,343,843.00	0.07
40	Beban Pemeliharaan	7,980,000.00	-	7,980,000.00	-
41	Beban Perjalanan Dinas	179,689,233.00	91,546,429.00	88,142,804.00	0.49
42	Beban Bunga	-	-	-	-
43	Beban Subsidi	-	-	-	-
44	Beban Hibah	3,717,132,050.00	1,395,783,430.00	2,321,348,620.00	0.62
45	Beban Bantuan Sosial	-	-	-	-
46	Beban Penyusutan dan Amortisasi	163,666,120.00	200,967,976.00	(37,301,856.00)	100.00
47	Beban Penyisihan Piutang	-	-	-	-
48	Beban Transfer	-	-	-	-
49	Beban Bantuan Keuangan	-	-	-	-
50	Beban Lain-lain	-	-	-	-
51					
52	<b>Jumlah Beban</b>	<b>7,032,932,300.00</b>	<b>4,461,319,960.00</b>	<b>2,571,612,340.00</b>	<b>0.37</b>
53					
54	<b>SURPLUS/(DESFISIT) DARI OPERASI</b>	<b>(7,030,097,020.00)</b>	<b>(4,461,319,960.00)</b>	<b>(2,568,777,060.00)</b>	<b>0.37</b>
55					

NO	URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
56	<b>SURPLUS NON OPERASIONAL</b>	-	-	-	-
57	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	-	-	-	-
58	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang -	-	-	-	-
59	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	-	-	-	-
60					
61	<b>DEFISIT NON OPERASIONAL</b>	-	-	-	-
62	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	-	-	-	-
63	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	-	-	-	-
64	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	-	-	-	-
65	<b>JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN</b>	-	-	-	-
66	<b>SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR</b>	<b>(7,030,097,020.00)</b>	<b>(4,461,319,960.00)</b>	<b>(2,568,777,060.00)</b>	<b>0.37</b>
67					
68	<b>POS LUAR BIASA</b>	-	-	-	-
69	PENDAPATAN LUAR BIASA - LO	-	-	-	-
70	BEBAN LUAR BIASA	-	-	-	-
71	<b>JUMLAH POS LUAR BIASA</b>	-	-	-	-
72					
73	<b>SURPLUS/(DEFISIT) - LO</b>	<b>(7,030,097,020.00)</b>	<b>(4,461,319,960.00)</b>	<b>(2,568,777,060.00)</b>	<b>0.37</b>

Praya, 15 Februari 2023  
Kepala Dinas Ketahanan Pangan  
Kab. Lombok Tengah



LAIQI AHMAD SATRIADI, ST  
NIP. 19651118 199603 1 002

**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
LAPORAN OPERASIONAL**

URAIAN	DINAS KETAHANAN PANGAN				
	2021	LRA 2022	D	K	2022
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>					
<b>PENDAPATAN</b>					
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					
<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>	-	-	-	-	-
<b>Pajak Hotel</b>	-	-	-	-	-
Hotel Bintang Empat					
Hotel Bintang Dua					
Hotel Bintang Satu					
Hotel Melati Dua					
Hotel Melati Satu					
Cottage					
Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos					
<b>Pajak Restoran</b>	-	-	-	-	-
Restoran					
Rumah Makan					
Café					
Katering					
<b>Pajak Hiburan</b>	-	-	-	-	-
Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana					
Mandi Uap/Spa					
Pajak Hiburan / Pertandingan Olahraga					
<b>Pajak Reklame</b>	-	-	-	-	-
Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron					
Reklame Kain					
Reklame Melekat/Stiker					
<b>Pajak Penerangan Jalan</b>	-	-	-	-	-
Pajak Penerangan Jalan PLN					
<b>Pajak Parkir</b>	-	-	-	-	-
Pajak Parkir					
<b>Pajak Air Tanah</b>	-	-	-	-	-
Pajak Air Tanah					
<b>Pajak Sarang Burung Walet</b>	-	-	-	-	-
Pajak Sarang Burung Walet					
<b>Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</b>	-	-	-	-	-

URAIAN	DINAS KETAHANAN PANGAN				
Batu dan Pasir					
<b>Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan</b>	-	-	-	-	-
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan					
<b>Pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan</b>	-	-	-	-	-
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan					
<b>Pendapatan Retribusi Daerah</b>	-	-	-	-	-
<b>Retribusi Jasa Umum</b>	-	-	-	-	-
Retribusi Pelayanan Kesehatan					
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan					
Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum					
Retribusi Pelayanan Pasar					
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor					
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi					
<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	-	-	-	-	-
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah					
Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan					
Retribusi Terminal					
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa					
Retribusi Rumah Potong Hewan					
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga					
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah					
Retribusi Tera/Tera Ulang					
<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	-	-	-	-	-
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan					
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol					
Retribusi Izin Gangguan/Keramaian					
Retribusi Izin Trayek					
Retribusi Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA)					
<b>Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	-	-	-	-	-
<b>Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD</b>	-	-	-	-	-
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD .....					
Dana Pembinaan dari Perusahaan Milik Daerah / BUMD					
<b>Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta</b>	-	-	-	-	-
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Patungan					

URAIAN	DINAS KETAHANAN PANGAN				
<b>Lain-lain PAD yang sah</b>	-	<b>2,835,280.00</b>	-	-	<b>2,835,280.00</b>
<b>Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan</b>	-	-	-	-	-
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua					
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat					
Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan					
Penghapusan Barang Inventaris (Perlengkapan kantor)					
<b>Penerimaan Jasa Giro</b>	-	-	-	-	-
Jasa Giro Kas Daerah					
Jasa Giro Pemegang Kas					
<b>Penerimaan Bunga Deposito</b>	-	-	-	-	-
Rekening Deposito Pada Bank .....					
<b>Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)</b>	-	-	-	-	-
Kerugian Uang					-
Kerugian Barang					
<b>Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan</b>	-	<b>2,835,280.00</b>	-	-	<b>2,835,280.00</b>
Bidang Kesehatan					
Bidang Pekerjaan Umum					
Bidang Perencanaan Pembangunan		2,835,280.00			2,835,280.00
Bidang Pariwisata					
Bidang Perhubungan					
<b>Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan</b>	-	-	-	-	-
Hasil Eksekusi Jaminan Atas Pelaksanaan Pekerjaan					
<b>Pendapatan Dari Pengembalian</b>	-	-	-	-	-
Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	-				-
Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas					-
Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Beban Pegawai					-
Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Beban Barang Jasa					-
Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Beban Modal					-
Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Beban Hibah					-
Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan penyetoran sisa kas					-
Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Beban Bantuan Keuangan Ke Desa					-
<b>Pendapatan BLUD</b>	-	-	-	-	-
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD					
Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD					
Pendapatan Lain-lain BLUD					
<b>Penerimaan Lain-Lain</b>	-	-	-	-	-
Penerimaan Lain-Lain					
<b>Pendapatan Dana Kapitasi JKN</b>	-	-	-	-	-

URAIAN	DINAS KETAHANAN PANGAN				
Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Ubung					
Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Penujak					
Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Praya					
Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sengkol					
Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Teratak					
Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Darek					
Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Janapria					
Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pengadang					
Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Kuta					
Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Ganti					
Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Kopang					
Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bagu					
Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bonjeruk					
Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Puyung					
Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Mantang					
Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pringgarata					
Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Langko					
Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Batunyala					
Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Aikmual					
Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Mujur					
Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Teruwai					
Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Batujangkih					
Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Aik Darek					
Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Muncan					
Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Mangkung					
<b>Pendapatan dari Sumbangan pihak ketiga</b>	-	-	-	-	-
Pendapatan dari pihak ketiga					
<b>Pendapatan dari UPTD</b>	-	-	-	-	-
Pendapatan dari UPTD (Unit Transfusi Darah)					
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	-	<b>2,835,280.00</b>	-	-	<b>2,835,280.00</b>
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>					
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>					
<b>Dana Bagi Hasil Pajak</b>	-	-	-	-	-
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan					
Bagi Hasil dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pasal 23 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri					
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau					

URAIAN	DINAS KETAHANAN PANGAN				
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21					
<b>Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam</b>	-	-	-	-	-
Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan					
Bagi Hasil Dari Dana Reboisasi					
Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)					
Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan					
Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi					
Bagi Hasil dari Pertambangan Umum					
<b>Dana Alokasi Umum</b>	-	-	-	-	-
Dana Alokasi Umum					
<b>Dana Alokasi Khusus</b>	-	-	-	-	-
Dana Alokasi Khusus Non Reboisasi					
Dana Alokasi Khusus Non Fisik					
<b>Jumlah Pendapatan Transfer - Dana Perimbangan</b>	-				
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA</b>					
<b>Dana Otonomi Khusus</b>	-	-	-	-	-
Dana Otonomi Khusus					
<b>Dana Penyesuaian</b>	-	-	-	-	-
Tunjangan Profesi Guru PNSD					
Tambahan Penghasilan Guru PNSD					
Dana Insentif Daerah					
Dana Desa					
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya</b>	-	-	-	-	-
<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>					
<b>Pendapatan Bagi Hasil Pajak</b>	-	-	-	-	-
Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor					
Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor					
Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor					
Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah					
Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan					
Bagi Hasil dari Pajak Rokok					

URAIAN	DINAS KETAHANAN PANGAN				
<b>Pendapatan Bagi Hasil Lainnya</b>	-	-	-	-	-
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya					
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi</b>	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Pendapatan Transfer</b>	-	-	-	-	-
<b>LAIN - LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>					
<b>Pendapatan Hibah - LO</b>	-	-	-	-	-
Pendapatan Hibah Dari Pemerintah					
Pendapatan Hibah dari WISMP					
Pendapatan Hibah Barang/Aset pada tahun berjalan					
Program PKP SPM Dikdas					
Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada PDAM					
Hibah Dana BOS					
Hibah Pusat Untuk Sekolah Swasta					
Hibah ADB teknikal					
<b>Dana Darurat - LO</b>	-	-	-	-	-
Dana Darurat					
<b>Pendapatan Lainnya - LO</b>	-	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya - LO					
<b>Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah</b>	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Pendapatan</b>	-	<b>2,835,280.00</b>	-	-	<b>2,835,280.00</b>
<b>BEBAN</b>	<b>4,461,319,960.00</b>	<b>6,893,776,510.00</b>	<b>958,842,695.00</b>	<b>819,686,905.00</b>	<b>7,032,932,300.00</b>
<b>Beban Pegawai</b>	<b>2,101,699,249.00</b>	<b>2,183,620,416.00</b>	<b>65,584,012.00</b>	-	<b>2,249,204,428.00</b>
<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>1,388,482,168.00</b>	<b>1,419,493,888.00</b>	-	-	<b>1,419,493,888.00</b>
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,081,962,600.00	1,084,488,300.00			1,084,488,300.00
Tunjangan Keluarga	103,140,998.00	109,115,251.00			109,115,251.00
Tunjangan Jabatan	112,715,000.00	127,295,000.00			127,295,000.00
Tunjangan Fungsional	-				-
Tunjangan Fungsional Umum	25,760,000.00	26,955,000.00			26,955,000.00
Tunjangan Beras	59,601,660.00	64,815,900.00			64,815,900.00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5,285,845.00	6,806,979.00			6,806,979.00
Pembulatan Gaji	16,065.00	17,458.00			17,458.00
Iuran Jaminan Kesehatan					-
Uang Paket					-

URAIAN	DINAS KETAHANAN PANGAN				
Tunjangan Panitia Musyawarah					-
Tunjangan Komisi					-
Tunjangan Panitia Anggaran					-
Tunjangan Badan Kehormatan					-
Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya					-
Tunjangan Perumahan					-
Uang Jasa Pengabdian					-
Tunjangan Transportasi					-
Tunjangan Reses					-
Iuran Kecelakaan Kerja/Iuran Kematian					-
<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>713,217,081.00</b>	<b>764,126,528.00</b>	<b>65,584,012.00</b>	<b>-</b>	<b>829,710,540.00</b>
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja					-
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas					-
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi					-
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	713,217,081.00	764,126,528.00	65,584,012.00		829,710,540.00
Tunjangan Profesi Guru PNSD					-
Tambahan Penghasilan Guru PNSD					-
Tambahan Penghasilan Profesi Guru sertifikasi					-
Tambahan Penghasilan Guru PNSD non Sertifikasi					-
<b>Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Beban Penunjang Operasional Pimpinan DPRD					-
Beban Penunjang Komunikasi Insentif Pimpinan Dan Anggota DPRD					-
Beban Penunjang Operasional KDH/WKDH					-
<b>Insentif Pemungutan Pajak Daerah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel					-
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran					-
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan					-
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame					-
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan					-
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir					-
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah					-
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet					-
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					-
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan					-
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan					-
<b>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah					-
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan					-

URAIAN	DINAS KETAHANAN PANGAN				
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan					-
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar					-
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor					-
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah					-
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan					-
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa					-
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan					-
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penjualan Produksi Usaha Daerah					-
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan					-
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol					-
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan					-
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek					-
<b>Uang Lembur</b>	-	-	-	-	-
Uang Lembur PNS					-
Uang Lembur Non PNS					-
<b>Beban Pegawai BLUD</b>	-	-	-	-	-
Beban Pegawai BLUD					-
<b>Beban Pegawai BOS</b>	-	-	-	-	-
Beban Pegawai BOS					-
<b>Uang Piket</b>	-	-	-	-	-
Uang Piket PNS					-
Uang Piket Non PNS					-
<b>Beban Barang dan Jasa</b>	<b>762,869,305.00</b>	<b>902,311,544.00</b>	<b>4,078,070.00</b>	<b>3,459,912.00</b>	<b>902,929,702.00</b>
<b>Beban Barang Extracomptable</b>	-	-	-	-	-
<b>Beban Barang Extracomptable</b>					
<b>Beban Persediaan</b>	<b>190,107,000.00</b>	<b>197,086,250.00</b>	<b>204,500.00</b>	<b>590,000.00</b>	<b>196,700,750.00</b>
<b>Beban Bahan Pakai Habis</b>	<b>188,870,000.00</b>	<b>196,218,250.00</b>	<b>204,500.00</b>	<b>590,000.00</b>	<b>195,832,750.00</b>
Beban Alat Tulis Kantor	62,215,000.00	68,598,900.00	204,500.00	590,000.00	68,213,400.00
Beban Dokumen/Administrasi Tender	-	-			-
Beban Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1,081,400.00	960,000.00			960,000.00
Beban Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	8,770,000.00	6,830,000.00			6,830,000.00
Beban Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	843,250.00	1,938,000.00			1,938,000.00
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas	103,735,350.00	97,606,350.00			97,606,350.00
Beban Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	-	-			-
Beban Pengisian Tabung Gas	-	-			-

URAIAN	DINAS KETAHANAN PANGAN				
Beban Dekorasi dan Publikasi	-	-			-
Beban Alat-alat Kesehatan Habis Pakai	8,700,000.00	9,000,000.00			9,000,000.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		5,000,000.00			5,000,000.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					
Beban pengisian tangki air					-
Beban alat-alat perikanan habis pakai					-
Beban alat-alat perlengkapan dinas	225,000.00	675,000.00			675,000.00
Beban Alat/bahan komputer	3,300,000.00	5,610,000.00			5,610,000.00
<b>Beban Bahan/Material</b>	<b>1,237,000.00</b>	<b>868,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>868,000.00</b>
Beban Bahan Baku Bangunan	390,000.00				-
Beban Bahan/Bibit Tanaman	-				-
Beban Bibit Ternak	-				-
Beban Bahan Obat-Obatan	-	-			-
Beban Bahan Kimia dan Pupuk	-				-
Beban Bahan Pakaian	-				-
Beban Bahan Perbengkelan	-				-
Beban bahan makanan/minuman	847,000.00	868,000.00			868,000.00
Beban Bahan Peralatan Elektronik					-
Beban Bahan Kependidikan					-
Beban Bahan-bahan Kesehatan					-
<b>Beban Cetak</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Beban Cetak	-				-
<b>Beban Jasa</b>	<b>481,215,876.00</b>	<b>517,556,061.00</b>	<b>3,873,570.00</b>	<b>2,869,912.00</b>	<b>518,559,719.00</b>
<b>Honorarium PNS</b>	<b>3,234,000.00</b>	<b>3,234,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,234,000.00</b>
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,234,000.00	3,234,000.00			3,234,000.00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber					-
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa					-
Honorarium Peserta					-
Honorarium Tim Pemeriksa Barang					-
Honorarium PNS Lainnya					-
Honorarium Tim Pemeriksa Akhir Pekerjaan					-
<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	-				-

URAIAN	DINAS KETAHANAN PANGAN				
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-				-
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber					-
Honorarium Peserta					-
Honorarium Tim Pemeriksa Barang					-
<b>Beban Jasa Kantor</b>	<b>323,500,592.00</b>	<b>335,286,363.00</b>	<b>3,873,570.00</b>	<b>2,869,912.00</b>	<b>336,290,021.00</b>
Beban Telepon	7,666,200.00	7,380,480.00	637,420.00	631,700.00	7,386,200.00
Beban Air	3,883,200.00	3,831,080.00	401,092.00	221,300.00	4,010,872.00
Beban Listrik	15,562,192.00	17,822,603.00	2,835,058.00	2,016,912.00	18,640,749.00
Beban Surat Kabar/Majalah	3,480,000.00	3,480,000.00			3,480,000.00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	-	-			-
Beban Paket/Pengiriman					-
Beban Sertifikasi					-
Beban Jasa Transaksi Keuangan					-
Beban Jasa Biaya Perencanaan dan Pengawasan					-
Beban Jasa Konsultasi					-
Beban Uang Transport peserta Non PNS					-
Beban Jasa Tenaga Laboratorium	46,419,000.00	45,322,200.00			45,322,200.00
Beban Jasa Hadiah Uang/Barang					-
Beban Pajak Bumi dan Bangunan					-
Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6,890,000.00	3,850,000.00			3,850,000.00
Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum		73,500,000.00			73,500,000.00
Beban Jasa Teknis Pertanian dan Pangan	17,500,000.00	17,500,000.00			17,500,000.00
Beban Jasa Tenaga Administrasi	49,600,000.00	8,000,000.00			8,000,000.00
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	172,500,000.00	154,600,000.00			154,600,000.00
Beban Jasa lainnya					-
<b>Beban Penggandaan</b>	-	-	-	-	-
Beban Penggandaan	-				-
<b>Beban Jasa Yang Bersumber dari Dana BOS</b>	-	-	-	-	-
Beban Jasa Yang Bersumber dari Dana BOS					-
<b>Beban Premi Asuransi</b>	-	<b>1,296,000.00</b>	-	-	<b>1,296,000.00</b>
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN		572,184.00			572,184.00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN		723,816.00			723,816.00
Beban Premi Asuransi Kesehatan					-
Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah					-
<b>Beban Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>37,391,284.00</b>	<b>20,094,698.00</b>	-	-	<b>20,094,698.00</b>

URAIAN	DINAS KETAHANAN PANGAN				
Beban Jasa Service		-			-
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	8,800,000.00				
Beban Penggantian Suku Cadang Roda Dua	8,500,000.00				-
Beban Penggantian Suku Cadang Roda Empat	14,000,000.00	14,000,000.00			14,000,000.00
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas					-
Beban Jasa KIR					-
Beban Pajak Kendaraan Bermotor	6,091,284.00	6,094,698.00			6,094,698.00
Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan					-
<b>Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	-	-	-	-	-
Beban Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas					-
Beban Sewa Gedung/Kantor/Tempat					-
Beban Sewa Ruang Rapat/Pertemuan					-
<b>Beban Sewa Sarana Mobilitas</b>	-	-	-	-	-
Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat					-
<b>Beban Sewa Alat Berat</b>	-	-	-	-	-
Beban Sewa Eskavator					-
Beban Sewa Bulldoser					-
<b>Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	-	-	-	-	-
Beban Sewa Meja Kursi					-
Beban Sewa Peralatan Komputer/Jasa Cloud					-
Beban Sewa Proyektor					-
Beban Sewa Generator					-
Beban Sewa Tenda	-	-			-
Beban Sewa Pakaian Adat/Tradisional					-
Beban Sewa Alat Praktik					-
Beban Sewa Sound System					-
<b>Beban Makanan dan Minuman</b>	<b>89,340,000.00</b>	<b>126,895,000.00</b>	-	-	<b>126,895,000.00</b>
Beban Makanan Dan Minuman Harian Pegawai					-
Beban Makanan Dan Minuman Rapat	89,340,000.00	126,895,000.00			126,895,000.00
Beban Makanan Dan Minuman Tamu					-
Beban Makanan dan minuman pasien					-
<b>Beban Pakaian Dinas dan Atributnya</b>	-	-	-	-	-
Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)					-
Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)					-
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)					-
Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)					-
Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)					-
<b>Beban Pakaian Kerja</b>	-	-	-	-	-

URAIAN	DINAS KETAHANAN PANGAN				
Beban Pakaian Kerja Lapangan					-
<b>Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	-	-	-	-	-
Beban Pakaian Adat Daerah					-
Beban Pakaian Batik Tradisional					-
Beban Pakaian Olahraga					-
<b>Beban Beasiswa Pendidikan PNS</b>	-	-	-	-	-
Beban Beasiswa Tugas Belajar D3					-
Beban Beasiswa Tugas Belajar S1					-
Beban Beasiswa Tugas Belajar S2					-
Beban Beasiswa Tugas Belajar S3					-
<b>Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>27,750,000.00</b>	<b>30,750,000.00</b>	-	-	<b>30,750,000.00</b>
Beban Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan					-
Beban Sosialisasi	27,750,000.00	30,750,000.00			30,750,000.00
Beban Bimbingan Teknis					-
<b>Beban Pemeliharaan</b>	-	<b>7,980,000.00</b>	-	-	<b>7,980,000.00</b>
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					-
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya		2,500,000.00			2,500,000.00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin		1,830,000.00			1,830,000.00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer		3,650,000.00			3,650,000.00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					-
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya					-
<b>Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>91,546,429.00</b>	<b>179,689,233.00</b>	-	-	<b>179,689,233.00</b>
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	48,506,429.00	78,969,233.00			78,969,233.00
Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	43,040,000.00	100,720,000.00			100,720,000.00
Beban perjalanan dinas luar negeri					-
<b>Beban Bunga</b>	-	-	-	-	-
Bunga Utang Pinjaman Kepada Pemerintah					-
<b>Beban Subsidi</b>	-	-	-	-	-
Beban Subsidi					-
<b>Beban Hibah</b>	<b>1,395,783,430.00</b>	<b>3,807,844,550.00</b>	<b>725,514,493.00</b>	<b>816,226,993.00</b>	<b>3,717,132,050.00</b>
<b>Beban Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi</b>	-	-	-	-	-
Beban Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi.....					-

URAIAN	DINAS KETAHANAN PANGAN				
<b>Beban Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat</b>	-	-	-	-	-
Beban Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat					
<b>Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>	<b>1,120,783,430.00</b>	<b>2,331,844,550.00</b>	<b>725,514,493.00</b>	<b>816,226,993.00</b>	<b>2,241,132,050.00</b>
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	1,120,783,430.00	2,331,844,550.00	725,514,493.00	816,226,993.00	2,241,132,050.00
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Pihak Ketiga	-				-
Beban Barang Yang Diterima dari Pusat					-
<b>Beban Uang Untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>	<b>275,000,000.00</b>	<b>1,476,000,000.00</b>	-	-	<b>1,476,000,000.00</b>
Beban Uang Untuk diberikan kepada Masyarakat	275,000,000.00	1,476,000,000.00			1,476,000,000.00
Beban Uang Untuk diberikan kepada Pihak Ketiga					-
<b>Beban Bantuan Sosial</b>	-	-	-	-	-
<b>Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan</b>	-	-	-	-	-
Beban Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan					-
<b>Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>200,967,976.00</b>	-	<b>163,666,120.00</b>	-	<b>163,666,120.00</b>
<b>Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin</b>	<b>151,047,502.00</b>	-	<b>113,745,646.00</b>	-	<b>113,745,646.00</b>
Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Darat	151,047,502.00	-	113,745,646.00		113,745,646.00
Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Apung	-				-
Beban Penyusutan Alat-alat Bantu	-				-
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	-				-
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	-				-
Beban Penyusutan Alat Angkut Apung Bermotor	-				-
Beban Penyusutan Alat Angkut Apung Tak Bermotor	-				-
Beban Penyusutan Alat Angkut Bermotor Udara	-				-
Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	-				-
Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin	-				-
Beban Penyusutan Alat Ukur	-				-
Beban Penyusutan Alat Pengolahan	-				-
Beban Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	-				-
Beban Penyusutan Alat Kantor	-				-
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	-				-
Beban Penyusutan Komputer	-				-
Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	-				-
Beban Penyusutan Alat Studio	-				-
Beban Penyusutan Alat Komunikasi					-

URAIAN	DINAS KETAHANAN PANGAN				
Beban Penyusutan Peralatan Pemancar					-
Beban Penyusutan Alat Kedokteran					-
Beban Penyusutan Alat Kesehatan					-
Beban Penyusutan Unit-Unit Laboratorium					-
Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah					-
Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir					-
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika					-
Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan					-
Beban Penyusutan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (DATAM)					-
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup					-
Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika					-
Beban Penyusutan Senjata Api					-
Beban Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api					-
Beban Penyusutan Amunisi					-
Beban Penyusutan Senjata Sinar					-
Beban Penyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan					-
Beban Penyusutan Alat alat Pertanian					-
<b>Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan</b>	<b>49,920,474.00</b>	<b>-</b>	<b>49,920,474.00</b>	<b>-</b>	<b>49,920,474.00</b>
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	49,920,474.00		49,920,474.00		49,920,474.00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal					-
Beban Penyusutan Bangunan wisata rekreasi					-
Beban Penyusutan Bangunan Ruang Tunggu Pasien					-
Beban Penyusutan Bangunan Menara					-
Beban Penyusutan Bangunan Bersejarah					-
Beban Penyusutan Bangunan Tugu Peringatan					-
Beban Penyusutan Bangunan Space Iklan/Billboard					-
Beban Penyusutan Bangunan Candi					-
Beban Penyusutan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya					-
Beban Penyusutan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti					-
Beban Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu					-
Beban Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara					-
<b>Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Beban Penyusutan Jalan					-

URAIAN	DINAS KETAHANAN PANGAN				
Beban Penyusutan Jembatan					-
Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi					-
Beban Penyusutan Bangunan Air Pasang Surut					-
Beban Penyusutan Bangunan Air Rawa					-
Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam					-
Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah					-
Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku					-
Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor					-
Beban Penyusutan Bangunan Air					-
Beban Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih					-
Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor					-
Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah					-
Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan					-
Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik					-
Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik					-
Beban Penyusutan Instalasi Instalasi Pertahanan					-
Beban Penyusutan Instalasi Gas					-
Beban Penyusutan Instalasi Pengaman					-
Beban Penyusutan Jaringan Air Minum					-
Beban Penyusutan Jaringan Listrik					-
Beban Penyusutan Jaringan Telepon					-
Beban Penyusutan Jaringan Gas					-
<b>Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya</b>	-	-	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Renovasi					-
Beban Penyusutan Barang Yang di Gunausahakan					-
<b>Beban Penyusutan Aset Lainnya</b>	-	-	-	-	-
Beban Penyusutan Aset lainnya kondisi rusak berat	-				-
<b>Beban Penyisihan</b>	-	-	-	-	-
Beban Penyisihan					-
<b>Beban Transfer</b>	-	-	-	-	-
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa					-

URAIAN	DINAS KETAHANAN PANGAN				
Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa .....					-
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya					-
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya					-
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa					-
Beban Transfer kepada Partai Politik...					-
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya					-
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus					-
Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah					-
<b>Beban Bantuan Keuangan</b>	-	-	-	-	-
Beban Bantuan kepada Partai Politik...					
PNPM MP	-				
PNPM Integrasi	-				
Raskin	-				
Jamkesmas Non Quota					
Biaya Ganti Rugi Relokasi Pasar					
Beban bantuan sosial, yang bersumber pendanaannya berasal dari penerimaan dana BOS pada sekolah penerima Dana BOS					
<b>Beban Lain-lain</b>	-	-	-	-	-
Beban Lain-lain					
<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>4,461,319,960.00</b>	<b>6,893,776,510.00</b>	<b>958,842,695.00</b>	<b>819,686,905.00</b>	<b>7,032,932,300.00</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI OPERASI</b>	<b>(4,461,319,960.00)</b>	<b>(6,890,941,230.00)</b>	<b>(958,842,695.00)</b>	<b>(819,686,905.00)</b>	<b>(7,030,097,020.00)</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT NON OPERASIONAL</b>	-	-	-	-	-
<b>Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO</b>	-	-	-	-	-
Penjualan Aset Gedung					-
Penjualan Aset Peralatan dan Mesin					-
<b>Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO</b>					
<b>Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO</b>	-	-	-	-	-
Penyisihan Piutang Terbayar					-
Surplus atas TGR					
<b>DEFISIT NON OPERASIONAL</b>	-	-	-	-	-
<b>Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO</b>	-	-	-	-	-
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	-				-
<b>Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO</b>	-	-	-	-	-

URAIAN	DINAS KETAHANAN PANGAN				
Penghapusan Aset Rusak Berat-Gedung dan Bangunan					-
Penghapusan Aset Rusak Berat-Peralatan dan Mesin					-
Penghapusan Aset Yang Dihilangkan					
Defisit dari Kerugian Investasi Permanen					-
Penghapusan Piutang Pajak					-
Penghapusan Aset yg di reklasifikasi ke Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)					
Penyisihan Piutang Tak Terbayar					-
<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	-	-	-	-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>(4,461,319,960.00)</b>	<b>(6,890,941,230.00)</b>	<b>(958,842,695.00)</b>	<b>(819,686,905.00)</b>	<b>(7,030,097,020.00)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>	-	-	-	-	-
Pendapatan Luar Biasa - LO	-				-
<b>Beban Luar Biasa</b>	-	-	-	-	-
Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor di Desa Pemepek Kec. Pringgarata	-				-
Penyetoran Kembali Ke kas Negara Sisa Dana Pembangunan Infrastruktur Daerah K	-				-
Penanganan Bencana Alam Aktivitas Gunung Rinjani di Kab. Lombok Tengah	-				-
Penanggulangan bencana angin puting beliung dikecamatan praya tahun 2016					-
Penyetoran Kembali Ke Kas Negara dari Sisa Dana BOS Kabupaten Lombok Tengah di Tahun 2011					-
Penanggulangan Bencana Alam Angin Puting Beliung di desa Kabul Kec. Praya barat Daya Tahun 2016					-
Penanggulangan Bencana Rehab Jembatan Sukadana Kecamatan Pujut	-				-
Beban luar biasa, yang bersumber pendanaannya berasal dari penerimaan dana BOS pada sekolah penerima Dana BOS					
Penanggulangan bencana angin puting beliung dikecamatan Praya Timur dan Janapr	-				-
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA</b>	-	-	-	-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>	<b>(4,461,319,960.00)</b>	<b>(6,890,941,230.00)</b>	<b>(958,842,695.00)</b>	<b>(819,686,905.00)</b>	<b>(7,030,097,020.00)</b>

(4,461,319,960.00) (6,890,941,230.00) (958,842,695.00) (819,686,905.00) (7,030,097,020.00)



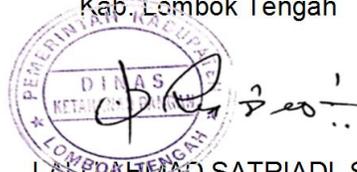
**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN**  
**N E R A C A**  
**PER 31 DESEMBER 2022 dan 31 DESEMBER 2021**

(Dalam Rupiah)

No	URAIAN	2022	2021
1	<b>ASET</b>		
2	<b>ASET LANCAR</b>		
3	<b>Kas dan Setara Kas</b>	-	-
4	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
6	Kas di BLUD	-	-
7	Setara Kas	-	-
8	Kas di Bendahara Puskesmas (FKTP)	-	-
9	Kas di Bendahara BOS	-	-
10	<b>Piutang Pendapatan</b>	-	-
11	Piutang Pajak Daerah	-	-
12	Piutang Retribusi Daerah	-	-
13	Piutang Lain-lain PAD	-	-
14	Penyisihan Piutang Pendapatan	-	-
15	<b>Piutang Lainnya</b>	-	-
16	Piutang Lain-lain Lainnya	-	-
17	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
18	<b>Beban Dibayar Dimuka</b>	-	-
19	<b>Persediaan</b>	816,816,993	725,718,993
20	<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>816,816,993</b>	<b>725,718,993</b>
21			
22	<b>ASET TETAP</b>		
23	Tanah	250,000,000	250,000,000
24	Peralatan dan Mesin	2,036,694,749	2,030,194,749
25	Gedung dan Bangunan	3,217,297,000	3,217,297,000
26	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
27	Aset Tetap Lainnya	-	-
28	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
29	Akumulasi Penyusutan	(2,422,287,189)	(2,258,621,069)
30	<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>3,081,704,560</b>	<b>3,238,870,680</b>
31			
32	<b>ASET LAINNYA</b>		
33	<b>Kemitraan dengan Pihak Ketiga</b>	-	-
34	Akum Penyusutan Kemitraan dg Pihak III	-	-
35	<b>Aset Tidak Berwujud</b>	-	-
36	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-
37	<b>Aset Lain-lain</b>	-	-
38	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	-	-
39	<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	-	-
40			
41	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>3,898,521,553</b>	<b>3,964,589,673</b>
42			
43	<b>KEWAJIBAN</b>		
44	<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>		
45	<b>Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)</b>	-	-
46	<b>Pendapatan Diterima Dimuka</b>	-	-
47	<b>Utang Belanja</b>	69,457,582	2,869,912
48	<b>Utang Jangka Pendek Lainnya</b>	-	-
49	<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>69,457,582</b>	<b>2,869,912</b>
50			
51	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>69,457,582</b>	<b>2,869,912</b>

No	URAIAN	2022	2021
52	<b>EKUITAS</b>		
53	EKUITAS	3,829,063,971	3,961,719,761
54	RK PPKD	-	-
55	<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>3,829,063,971</b>	<b>3,961,719,761</b>
56	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>3,898,521,553.00</b>	<b>3,964,589,673.00</b>

Praya, 15 Februari 2023  
Kepala Dinas Ketahanan Pangan  
Kab. Lombok Tengah



LASDIHAD Satriadi, ST  
NIP. 19651118 199603 1 002

**NERACA RINCI  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
PER 31 DESEMBER 2022**

(66,587,670.00)

NO	URAIAN	SKPD			
		2022	DEBET	KREDIT	2021
	<b>ASET</b>				
	<b>ASET LANCAR</b>				
	<b>Kas dan Setara Kas</b>				
	Kas di Kas Daerah	-			-
	Kas Bendahara Penerimaan	-			
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-	-
	Kas di BLUD	-	-	-	-
	Setara Kas				
	Kas di bendahara Puskesmas (FKTP)	-			
	Kas di Bendahara BOS	-			
	<b>Piutang Pendapatan</b>	-	-	-	-
	Piutang Pajak	-			-
	Penyisihan Piutang Pajak	-			-
	Piutang Retribusi	-			-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-			-
	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-			
	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-			
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-	-
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah	-	-	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-			
	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-			
	<b>Piutang Lainnya</b>	-	-	-	-
	<b>Bagian Lancar Tagihan Penjualan Ansuran</b>	-	-	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Ansuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas	-			
	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Ansuran	-			
	<b>Piutang Lain2 Lainnya</b>	-	-	-	-
	Piutang Lain2 Lainnya	-			-
	Penyisihan Piutang Lain-lain lainnya	-			
	<b>Beban di bayar dimuka</b>	-	-	-	-
	Beban di bayar dimuka	-			
	<b>Persediaan</b>	<b>816,816,993.00</b>	<b>816,816,993.00</b>	<b>725,718,993.00</b>	<b>725,718,993.00</b>
	Persediaan Bahan Pakai Habis	590,000.00	590,000.00	204,500.00	204,500.00
	Persediaan Bahan/Material	-	-		-
	Persediaan Barang lainnya	816,226,993.00	816,226,993.00	725,514,493.00	725,514,493.00
	Persediaan Barang Kuasi				

<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>816,816,993.00</b>	<b>816,816,993.00</b>	<b>725,718,993.00</b>	<b>725,718,993.00</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	-	-	-	-
<b>Investasi Non Permanen</b>	-	-	-	-
Dana Bergulir	-	-	-	-
Dana Bergulir	-	-	-	-
Penyisihan	-	-	-	-
<b>Investasi Permanen</b>	-	-	-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten	-	-	-	-
Penyertaan Modal kepada BUMD /Perusahaan Daerah	-	-	-	-
<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	-	-	-	-
<b>ASET TETAP</b>				
Tanah	250,000,000.00	-	-	250,000,000.00
Peralatan dan Mesin	2,036,694,749.00	6,500,000.00	-	2,030,194,749.00
Gedung dan Bangunan	3,217,297,000.00	-	-	3,217,297,000.00
Jalan, Irigasi, dan Jembatan	-	-	-	-
Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan	(2,422,287,189.00)	-	163,666,120.00	(2,258,621,069.00)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>3,081,704,560.00</b>	<b>6,500,000.00</b>	<b>163,666,120.00</b>	<b>3,238,870,680.00</b>
<b>DANA CADANGAN</b>	-	-	-	-
Dana Cadangan	-	-	-	-
<b>JUMLAH DANA CADANGAN</b>	-	-	-	-
<b>ASET LAINNYA</b>				
<b>Tagihan Jangka Panjang</b>				
<b>Tagihan Penjualan Angsuran</b>	-	-	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran Kendaraan Perorangan Dinas	-	-	-	-
<b>Tuntutan Ganti Kerugian Daerah</b>	-	-	-	-
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah thd Bendahara	-	-	-	-
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah thd PN Bukan Bendahara	-	-	-	-
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah thd Pihak Ketiga	-	-	-	-
Penyisihan TGR	-	-	-	-
<b>Kemitraan dengan Pihak Ketiga</b>				
<b>Sewa</b>				
Tanah				
Gedung dan Bangunan				
Akumulasi Penyusutan				
<b>Kerjasama Pemanfaatan</b>				
Tanah				

	Gedung dan Bangunan				
	Akumulasi Penyusutan				
	<b>Aset Tak Berwujud</b>	-	-	-	-
	Aset Tak Berwujud Lainnya	-	-	-	-
	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	-	-	-	-
	<b>Aset Lain-lain</b>	-	-	-	-
	Aset lain - lain rusak berat	-	-	-	-
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	-	-	-
	Detail Engineering Design (DED)	-	-	-	-
	Barang yang di serahkan kpd Masyarakat	-	-	-	-
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	-	-	-	-
	<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	-	-	-	-
	<b>RK - SKPD</b>				
	<b>TOTAL ASET</b>	<b>3,898,521,553.00</b>			<b>3,964,589,673.00</b>
	<b>KEWAJIBAN</b>	-			-
	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
	<b>Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)</b>	-			-
	Utang luran Jamkes	-			-
	Utang PPh Pusat	-			-
	Utang PPN Pusat	-			-
	Utang PFK Lainnya	-			-
	<b>Utang Bunga</b>	-			-
	Utang Bunga kepada pemerintah pusat	-			-
	<b>Bagian Lancar Utang Jangka Panjang</b>	-			-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-			-
	<b>Pendapatan diterima dimuka</b>	-	-	-	-
	Uang Muka Penjualan Produk Pemda dari pihak III	-	-	-	-
	<b>Utang Belanja</b>	<b>69,457,582.00</b>	<b>2,869,912.00</b>	<b>69,457,582.00</b>	<b>2,869,912.00</b>
	Utang Belanja Pegawai	65,584,012.00		65,584,012.00	-
	Utang Belanja barang dan Jasa	3,873,570.00	2,869,912.00	3,873,570.00	2,869,912.00
	Utang Belanja Modal	-			-
	<b>Utang Transfer</b>	-	-	-	-
	Utang Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa	-			-
	<b>Utang Jangka Pendek Lainnya</b>	-	-	-	-
	Utang Jangka Pendek Lain - lain Lainnya	-	-	-	-
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>69,457,582.00</b>			<b>2,869,912.00</b>
	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	-			-
	Utang Luar Negeri	-			-
	Utang kepada Pemerintah Pusat	-			-

	Utang kpd Pem. Kabupaten/Kota Lain	-			-
	Utang kepada BUMD	-			-
	Utang kepada Bank / Lembaga Keuangan	-			-
	Utang Dalam Negeri Lainnya	-			-
	Utang Bunga	-			-
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	-			-
	<b>TOTAL KEWAJIBAN</b>	<b>69,457,582.00</b>	-	-	<b>2,869,912.00</b>
	<b>EKUITAS</b>				
	Ekuitas Awal Tahun				-
	Surplus/ (Defisit ) LO				-
	RK PPKD				-
	Koreksi ekuitas				-
	<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>3,829,063,971.00</b>	-	-	<b>3,961,719,761.00</b>
	<b>TOTAL KEWAJIBAN &amp; EKUITAS</b>	<b>3,898,521,553.00</b>			<b>3,964,589,673.00</b>



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
DINAS KETAHANAN PANGAN  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN  
31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021

Kode	Uraian	2022	2021
1	<b>EKUITAS AWAL</b>	<b>3,961,719,761.00</b>	<b>4,065,890,987.00</b>
2	<b>SURPLUS/(DEFISIT)-LO</b>	<b>(7,030,097,020.00)</b>	<b>(4,461,319,960.00)</b>
3	<b>DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:</b>		
4	Koreksi Nilai Kas	-	-
5	Koreksi Nilai Piutang	-	-
6	Koreksi Nilai Beban Dibayar Dimuka	-	-
7	Koreksi Nilai Persediaan	-	-
8	Koreksi Nilai Investasi	-	-
9	Koreksi Nilai Aset Tetap	-	-
10	Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-	-
11	Koreksi Nilai Aset Lainnya	-	-
12	Koreksi Nilai Kewajiban	-	-
13	R/K PPKD	6,897,441,230.00	4,357,148,734.00
14	<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>3,829,063,971.00</b>	<b>3,961,719,761.00</b>

Praya, 15 Februari 2022  
Kepala Dinas Ketahanan Pangan  
Kab. Lombok Tengah



**LAKSMAD SATRIADI, ST**  
NIP. 19651118 199603 1 0024



NO	Uraian		2022	2021
			LPE 2022	LPE 2021
	<b>EKUITAS AWAL</b>		<b>3,961,719,761.00</b>	<b>4,065,890,987.00</b>
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)-LO</b>		<b>(7,030,097,020.00)</b>	<b>(4,461,319,960.00)</b>
	<b>DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:</b>			-
	<b>Koreksi Nilai Kas</b>		-	-
		Kas di Kas Daerah		
		Kas di Bendahara Penerimaan		
		Kas di Bendahara Pengeluaran		
		Kas di BLUD		
		Setara Kas		
		Kas di Bendahara Puskesmas (FKTP)		
		Kas di Bendahara BOS		
	<b>Koreksi Nilai Piutang</b>		-	-
		Piutang Pajak		
		Penyisihan Piutang Pajak		
		Piutang Retribusi		
		Penyisihan Piutang Retribusi		
		Piutang Hasil Pengelolaan Kekay Daerah		
		Piutang Lain2 PAD		
		Penyisihan Piutang Lain-lain PAD		
		Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		
		Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
		Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
		Piutang TGR		
		Penyisihan Piutang TGR		
		Piutang Lain-lain Lainnya		
		Penyisihan Piutang Lain-lain Lainnya		
	<b>Koreksi Nilai Beban Dibayar Dimuka</b>		-	-
		Jasa dibayar dimuka		
		Barang dibayar dimuka		
	<b>Koreksi Nilai Persediaan</b>		-	-
		Persediaan Bahan Pakai Habis		
		Persediaan Bahan/ Material		
		Persediaan Barang Lainnya		
	<b>Koreksi Nilai Investasi</b>		-	-

		Investasi Permanen		
		Investasi Nonpermanen		
		Penyisihan Investasi Non Permanen		
	<b>Koreksi Nilai Aset Tetap</b>		-	-
		Tanah		
		Peralatan dan Mesin	-	-
		Penyusutan		
		Gedung dan Bangunan	-	-
		Penyusutan		
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
		Penyusutan		
		Aset Tetap Lainnya		
		Penyusutan		
		Konstruksi Dalam Pengerjaan		
		Akumulasi Penyusutan		
	<b>Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap</b>		-	-
		Peralatan dan Mesin		-
		Gedung dan Bangunan		
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan		-
		Akumulasi Penyusutan		
	<b>Koreksi Nilai Aset Lainnya</b>		-	-
		Tagihan Jangka Panjang -TGR		
		Penyisihan TGR		
		Kemitraan dengan Pihak III		
		Aset Tidak Berwujud		
		Extracomptabel		
		Akumulasi Penyusutan		
		Aset Lain-lain		
	<b>Koreksi Nilai Kewajiban</b>		-	-
		Utang PFK		
		Utang Bunga		
		Bagian Utang Jangka Panjang		
		Pendapatan diterima dimuka		
		Utang Barang dan Jasa		
		Utang Belanja		
		Utang Transfer		
		Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	<b>Koreksi Nilai Aset Non APBD</b>			
	<b>RK</b>		6,897,441,230.00	4,357,148,734.00
	<b>EKUITAS AKHIR</b>		3,829,063,971.00	3,961,719,761.00

Ekuitas Neraca

3,829,063,971.00





**DAFTAR JURNAL KOREKSI DAN PENYESUAIAN**

NO	URAIAN	LAPORAN	D	K	KETERANGAN
1	BEBAN PERSEDIAAN	LO	204,500.00		Jurnal untuk penyesuaian saldo awal atk
	PERSEDIAAN ATK	NERACA		204,500.00	
2	PERSEDIAAN ATK	NERACA	590,000.00		Jurnal untuk penyesuaian saldo akhir atk
	BEBAN PERSEDIAAN	LO		590,000.00	
3	BEBAN BARANG YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT	LO	725,514,493.00		Jurnal untuk penyesuaian saldo Awal barang yang diserahkan kepada masyarakat
	PERSEDIAAN BARANG LAINNYA	NERACA		725,514,493.00	
4	PERSEDIAAN BARANG LAINNYA	NERACA	816,226,993.00		Jurnal untuk penyesuaian saldo Akhir barang yang diserahkan kepada masyarakat
	BEBAN BARANG YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT	LO		816,226,993.00	
6	BEBAN TELEPON	LO		631,700.00	Jurnal untuk penyesuaian pembayaran listrik dan air yang terutang sampai dengan akhir Desember 2021
	BEBAN AIR	LO		221,300.00	
	BEBAN LISTRIK	LO		2,016,912.00	
	UTANG BELANJA BARANG JASA	NERACA	2,869,912.00		
7	BEBAN TELEPON	LO	637,420.00		Jurnal untuk penyesuaian pembayaran listrik dan air yang terutang sampai dengan akhir Desember 2022
	BEBAN AIR	LO	401,092.00		
	BEBAN LISTRIK	LO	2,835,058.00		
	UTANG BELANJA BARANG JASA	NERACA		3,873,570.00	
8	BEBAN PEGAWAI	LO	65,584,012.00		UTANG TPP DESEMBER 2022
	UTANG BELANJA PEGAWAI	NERACA		65,584,012.00	
9	Beban Penyusutan Aset Tetap Peralatan Mesin	LO	113,745,646.00		
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan Mesin	NERACA		113,745,646.00	
10	Beban Penyusutan Aset Tetap Gedung Bangunan	LO	49,920,474.00		
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung Bangunan	NERACA		49,920,474.00	